

PENGARUH REFORMASI POLITIK TERHADAP ARAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL PASCA KRISIS 1998

¹Sulton Arif Mauludi, ²Irawan, ³Rohmat Mulyana Sapdi

¹Pascasarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Email: 2259100054@student.uinsgd.ac.id

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Email: irawan@uinsgd.ac.id

³UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Email: rohmatmulyana@uinsgd.ac.id

Abstract *This study examines the shifts in national education policy following the 1998 crisis by positioning political reform as a structural force that reshaped the relationship between the state and the education sector. The main issues explored include educational decentralization, changes in curriculum orientation, the transformation of civic education, and the redistribution of authority between central and local governments. The study aims to assess the extent to which political reform has influenced education policy through regulatory changes, funding patterns, and bureaucratic practices. The research employs an empirical approach through regulatory document analysis, field interviews, and an examination of policy linkages using a simple qualitative quantitative model. The findings show that decentralization has produced varied regional performance, curricular revisions have moved toward a more democratic orientation, and civic education policies have undergone substantive transformation. These results indicate that political reform not only altered governmental structures but also expanded participatory spaces and reshaped the direction of education policy. Field evidence supports the view that post-reform political dynamics have driven major changes in the education sector, although disparities in regional capacity continue to limit consistent policy implementation across regions.*

Keywords: *Political Reform, Education Policy, Decentralization.*

Pendahuluan

Reformasi 1998 merupakan salah satu tonggak sejarah penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Tumbangnya rezim Orde Baru menandai lahirnya era baru yang lebih demokratis, ditandai dengan keterbukaan politik, desentralisasi pemerintahan, serta meningkatnya partisipasi masyarakat sipil. Reformasi politik yang terjadi tidak hanya menyentuh aspek pemerintahan dan hukum, tetapi juga membawa implikasi signifikan terhadap arah kebijakan pendidikan nasional. Reformasi politik membuka ruang bagi desentralisasi kekuasaan, transparansi, serta partisipasi masyarakat, yang kemudian menjadi landasan lahirnya reformasi pendidikan di Indonesia (Haryanto, 2020).

Transisi ini juga membuka pergeseran kelembagaan politik, termasuk dalam tata kelola pemerintahan dan sektor publik seperti pendidikan. Banyak studi mencatat

bahwa sistem pendidikan pada masa sebelumnya bersifat sangat terpusat, dengan kurikulum dan manajemen yang dikontrol oleh pemerintahan pusat (Batubara & Aman, 2024).

Salah satu transformasi besar pascareformasi yaitu kebijakan desentralisasi pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kebijakan ini memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk mengelola sistem pendidikan sesuai kebutuhan lokal (Suryadi, 2018). Konsep desentralisasi ini sejalan dengan semangat demokratisasi yang menjadi pilar utama reformasi politik.

Selain itu, reformasi juga mendorong perubahan kurikulum secara signifikan. Pascareformasi, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan kurikulum mulai dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (2004), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (2006), Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka. Perubahan tersebut merupakan respons terhadap dinamika global dan kebutuhan pembangunan bangsa (Supriyadi & Lestari, 2021). Namun, seringkali perubahan kurikulum juga memunculkan tantangan konsistensi kebijakan pendidikan.

Dalam amandemen UUD 1945 menegaskan kewajiban negara untuk mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% APBN dan APBD untuk sektor pendidikan. Hal ini merupakan wujud nyata komitmen reformasi politik terhadap peningkatan akses dan mutu pendidikan (Rohman & Subkhan, 2017). Akan tetapi, meskipun anggaran pendidikan meningkat, kesenjangan mutu pendidikan antar daerah masih menjadi persoalan serius.

Reformasi politik juga memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan, misalnya melalui pembentukan komite sekolah, organisasi profesi guru, dan keterlibatan lembaga swadaya masyarakat. Partisipasi ini diharapkan dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan (Susanti, 2019). Namun, kenyataannya, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat praktik birokratisasi dan politisasi pendidikan di berbagai daerah (Syafuruddin, 2020).

Lebih lanjut, di bidang pendidikan kewarganegaraan telah terjadi perubahan paradigma dari orientasi yang mendukung kekuasaan rezim menjadi orientasi yang mendorong partisipasi demokratis dan pendidikan warga aktif. Samsuri (2011) mencatat bahwa reformasi politik mendorong pembaharuan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam hal nomenklatur dan substansi pengajaran.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara reformasi politik dan pendidikan. Susanti (2019) menyoroti meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan pascareformasi, meski belum optimal dalam praktiknya. Supriyadi & Lestari (2021) menekankan dinamika perubahan kurikulum sebagai konsekuensi dari reformasi pendidikan, tetapi menilai masih lemahnya konsistensi kebijakan. Sementara itu, Syafuruddin (2020) menunjukkan adanya

kecenderungan politisasi kebijakan pendidikan di era otonomi daerah yang justru memperlebar kesenjangan mutu pendidikan. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa reformasi politik memang mendorong transformasi kebijakan pendidikan, tetapi juga memunculkan tantangan baru yang menuntut analisis lebih komprehensif agar arah pembangunan pendidikan ke depan dapat lebih konsisten dan berkeadilan.

Urgensinya terletak pada kenyataan, meskipun telah lebih dari dua dekade sejak reformasi, berbagai persoalan seperti kesenjangan mutu, inkonsistensi kebijakan, dan politisasi pendidikan masih menjadi tantangan serius. Argumen yang dibangun dalam penelitian ini adalah bahwa reformasi politik tidak hanya berdampak pada aspek kelembagaan politik, tetapi juga menjadi fondasi utama perubahan dalam kebijakan pendidikan nasional.

Penelitian ini didasari pada asumsi bahwa perubahan politik nasional di era reformasi memiliki efek struktural terhadap kebijakan sektor pendidikan. Dalam kerangka kebijakan publik dan *political economy of education*, perubahan politik yang mencakup desentralisasi, partisipasi publik, dan penguatan demokrasi diharapkan memengaruhi arah kebijakan pendidikan nasional.

Meski demikian, perubahan tersebut tidak selalu berjalan mulus. Masih ditemukan tantangan seperti kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah, ambiguitas arah kebijakan, serta hubungan yang belum sepenuhnya jelas antara perubahan politik dan kebijakan pendidikan. Sebagai contoh, studi tentang ketimpangan pendidikan mencatat bahwa meskipun reformasi kebijakan telah dilakukan, disparitas pendidikan antar daerah tetap tinggi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk menelaah secara empiris bagaimana reformasi politik telah memengaruhi arah kebijakan pendidikan nasional di Indonesia pasca krisis 1998. Dengan mengetahui arah perubahan kebijakan tersebut, kita dapat memahami sejauh mana sektor pendidikan merespons dinamika politik, serta implikasinya terhadap pengelolaan dan kualitas pendidikan.

Kajian Pustaka

Teori kebijakan publik memberikan dasar untuk memahami bahwa kebijakan bukanlah keputusan teknis yang netral, melainkan hasil dari proses politik yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. Dye (2013) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pandangan ini relevan dengan konteks Indonesia pasca reformasi, ketika arah kebijakan pendidikan tidak lagi ditentukan secara sepihak oleh negara, melainkan dipengaruhi oleh dinamika demokrasi dan tuntutan masyarakat sipil. Hafidati (2021) menegaskan bahwa perubahan politik setelah reformasi membuka ruang bagi kebijakan pendidikan yang lebih partisipatif dan transparan.

Sedangkan dalam perspektif teori desentralisasi dapat memperkuat analisis mengenai perubahan struktural dalam tata kelola pendidikan. Rondinelli (1981) menjelaskan bahwa desentralisasi bukan hanya pelimpahan kewenangan administratif, tetapi juga perubahan paradigma dalam pengambilan keputusan publik. Setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan di Indonesia mengalami transformasi dari sistem yang sentralistik menjadi lebih terbuka. Pemerintah daerah dan satuan pendidikan memperoleh peran lebih besar dalam perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan program pendidikan. Sumintono (2024) menunjukkan bahwa penerapan *school-based management* merupakan salah satu bentuk nyata dari implementasi desentralisasi di bidang pendidikan.

Sementara itu, teori ekonomi politik pendidikan atau *political economy of education* digunakan untuk memahami bagaimana kepentingan politik, ekonomi, dan ideologi memengaruhi arah kebijakan pendidikan. Carnoy (2019) menyebutkan bahwa sistem pendidikan tidak bisa dilepaskan dari struktur kekuasaan yang ada, karena pendidikan sering dijadikan sarana untuk mempertahankan legitimasi politik atau memperluas pengaruh ideologis. Dalam konteks Indonesia, Aji (2024) menyoroti bahwa reformasi membuka ruang perdebatan mengenai siapa yang seharusnya mengendalikan arah pendidikan nasional, apakah negara, masyarakat, atau pasar. Teori ini membantu menjelaskan bahwa perubahan kebijakan pendidikan pasca reformasi bukan semata hasil perencanaan rasional, tetapi juga hasil dari proses negosiasi antar kepentingan yang berlangsung di ruang politik.

Sejumlah penelitian terdahulu mendukung kerangka teori ini. Sidauruk, Lestari, dan Hanafiah (2022) menemukan bahwa pelaksanaan desentralisasi pendidikan belum sepenuhnya berhasil mengurangi kesenjangan mutu antarwilayah, karena faktor politik lokal masih berpengaruh kuat terhadap pelaksanaan kebijakan. Penelusuran lain oleh Sari dan Sirozi (2023) menunjukkan bahwa perubahan politik nasional turut memengaruhi arah kebijakan pendidikan Islam, termasuk dalam pengembangan kurikulum dan tata kelola lembaga pendidikan.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan erat antara reformasi politik dengan perubahan arah kebijakan pendidikan di Indonesia. Reformasi membuka peluang bagi terbentuknya sistem pendidikan yang lebih demokratis, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan baru berupa ketimpangan implementasi di tingkat lokal.

Berdasarkan teori dan temuan penelitian terdahulu, penelitian ini membangun kerangka berpikir bahwa reformasi politik berperan sebagai faktor krusial yang memengaruhi arah kebijakan pendidikan nasional. Proses reformasi yang membawa nilai-nilai demokratisasi, transparansi, dan partisipasi publik menjadi katalisator bagi perubahan sistem pendidikan yang lebih desentralistik dan partisipatif. Dalam kerangka ini, kebijakan pendidikan nasional dipahami sebagai hasil dari interaksi

antara struktur politik yang berubah, aktor kebijakan di berbagai level pemerintahan, serta dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kebijakan (*policy study*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada upaya memahami secara mendalam bagaimana reformasi politik setelah krisis 1998 memengaruhi arah kebijakan pendidikan nasional. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menafsirkan makna dari fenomena sosial dan politik berdasarkan konteks historis dan sosialnya. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menelusuri relasi sebab akibat antara perubahan politik nasional dengan pergeseran paradigma kebijakan pendidikan.

Metode penelitian ini bersifat empiris, karena didasarkan pada data faktual berupa dokumen kebijakan, arsip, data statistik pendidikan, serta hasil wawancara dari informan kunci. Data empiris tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana reformasi politik berkontribusi terhadap perubahan arah kebijakan pendidikan nasional, baik dari sisi isi kebijakan (*policy content*), proses perumusan (*policy process*), maupun dampaknya terhadap tata kelola pendidikan (*policy outcome*).

Ruang lingkup penelitian mencakup relasi antara perubahan politik nasional dan transformasi arah kebijakan pendidikan Indonesia sejak masa reformasi hingga 2025. Objek penelitian meliputi struktur kebijakan, orientasi normatif, dan praktik implementasi kebijakan pendidikan. Penelitian dilakukan di beberapa lokasi, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, SMAN 1 Cianjur, serta lingkungan masyarakat yang memiliki pengalaman langsung dengan perubahan politik dan sosial pada masa reformasi. Pemilihan lokasi ini bertujuan memperoleh gambaran empiris yang mencerminkan konteks birokrasi, satuan pendidikan, dan masyarakat.

Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui telaah pustaka (*library research*), analisis dokumen, dan wawancara mendalam terhadap 10 hingga 15 informan yang terdiri dari pejabat pemerintah, akademisi, dan praktisi pendidikan. Instrumen utama penelitian mencakup pedoman wawancara terstruktur, lembar observasi, dan daftar regulasi pendidikan yang relevan. Kombinasi instrumen ini memungkinkan peneliti memeriksa hubungan antara perubahan politik dan kebijakan pendidikan secara konsisten, baik pada tataran regulasi maupun pengalaman lapangan.

Penelitian ini menggunakan metode dua variabel, yaitu Reformasi Politik (X) yang mengacu pada perubahan sistem politik nasional setelah krisis 1998 yang ditandai oleh desentralisasi, kebijakan pendidikan, demokratisasi, dan keterbukaan partisipasi publik serta variabel Arah Kebijakan Pendidikan Nasional (Y) yang

berfokus pada perubahan arah, prioritas, dan substansi kebijakan pendidikan nasional pasca reformasi.

Teknik analisis data ini dilakukan dengan pendekatan analisis campuran (*mixed method analysis*). Data kualitatif dianalisis secara tematik mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2018), yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Di sisi lain, data kuantitatif dianalisis secara deskriptif untuk mendukung temuan kualitatif, misalnya melalui perbandingan indikator pendidikan sebelum dan sesudah reformasi, seperti tingkat partisipasi sekolah dan alokasi anggaran pendidikan nasional.

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemetaan empiris yang menunjukkan sejauh mana reformasi politik berpengaruh terhadap arah kebijakan pendidikan nasional. Hasilnya dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih demokratis, partisipatif, dan berkeadilan sosial.

Pembahasan

Perubahan Struktur Politik dan Dampaknya pada Isi Kebijakan Pendidikan

Data lapangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur menunjukkan bahwa setelah reformasi 1998 kewenangan pendidikan yang dikelola pemerintah daerah meningkat 42 persen dibandingkan masa sebelumnya. Angka ini terlihat dari bertambahnya jumlah program daerah yang mengatur kurikulum lokal, pembinaan sekolah, dan rekrutmen tenaga pendidik. Temuan ini menguatkan pandangan Sumintono (2024) yang menegaskan bahwa desentralisasi memperluas ruang pengambilan keputusan di tingkat lokal. Informan pemerintah daerah menyatakan bahwa perubahan politik memberi peluang lebih besar bagi diskusi publik dan konsultasi kebijakan. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelum reformasi ketika hampir seluruh kebijakan bersumber dari pemerintah pusat.

Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa kurikulum pasca reformasi mengalami perubahan arah. Kurikulum 2004, 2006, 2013, dan Kurikulum Merdeka memakai landasan yang lebih terbuka terhadap partisipasi. Sebanyak 70 persen Guru yang diwawancarai menyatakan bahwa perubahan ini memberi ruang inovasi pembelajaran yang lebih besar.

Saat pemerintah menetapkan penggunaan kurikulum 2013 yang pendekatan pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah (*scientific approach*), baiknya madrasah pun mengikutinya (Irawan, 2019). Mereka juga melihat peningkatan kemampuan siswa dalam bertanya, berdiskusi, dan menilai isu sosial. Temuan ini konsisten dengan Carnoy (2019) yang menjelaskan bahwa sistem pendidikan pada negara yang lebih demokratis cenderung mengadopsi kurikulum yang menekankan partisipasi dan refleksi kritis.

Perubahan pada Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Indikator Reformasi

Sebesar 63% Guru di SMAN 1 Cianjur menyebutkan bahwa materi pendidikan kewarganegaraan yang mereka ajarkan saat ini menekankan kemampuan berpikir kritis dan partisipasi publik. Guru yang menjadi siswa pada masa sebelum reformasi menilai ada perbedaan tujuan yang jelas. Pada masa Orde Baru materi banyak berisi penekanan stabilitas dan kepatuhan politik. Temuan ini mendukung catatan Samsuri (2011) yang menunjukkan pergeseran karakter pendidikan kewarganegaraan setelah perubahan politik nasional.

1. Kenaikan Anggaran Pendidikan dan Implikasinya terhadap Kebijakan

Data statistik menunjukkan kenaikan anggaran pendidikan dari 9 persen APBN pada 1999 menjadi hampir 20 persen pada 2024. Peningkatan ini memberi dasar penguatan regulasi seperti Standar Nasional Pendidikan dan program pemerataan layanan. Hafidati (2021) menegaskan bahwa perubahan politik membuat pendidikan bergerak dari isu administratif menjadi isu publik yang strategis. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa sekolah negeri lebih merasakan dampak peningkatan anggaran daripada sekolah swasta kecil. Hal ini memperlihatkan ketimpangan distribusi manfaat yang masih terjadi.

Wawancara dengan guru swasta dan aparatur dinas menunjukkan variasi besar dalam kesiapan daerah. Guru di SMAN 1 Cianjur menyatakan bahwa implementasi kebijakan daerah berjalan relatif stabil karena dukungan anggaran dan manajemen. Di sisi lain, sekolah swasta kecil menyebutkan bahwa desentralisasi sering menambah beban administrasi tanpa dukungan sumber daya yang memadai. Temuan ini sejalan dengan laporan Sidauruk et al. (2022) yang menilai bahwa kapasitas daerah menjadi salah satu penentu keberhasilan desentralisasi pendidikan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa teori kebijakan publik dari Dye (2013) masih relevan untuk menjelaskan pola perubahan kebijakan pendidikan Indonesia. Namun data lapangan menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan saat ini melibatkan lebih banyak aktor dan lebih terbuka terhadap masukan publik. Ini menuntut revisi kecil pada teori yang sebelumnya menekankan dominasi pemerintah pusat. Pada teori desentralisasi Rondinelli (1981) terlihat bahwa kapasitas daerah perlu ditambahkan sebagai variabel kunci. Temuan juga memperkuat salah satu asumsi utama teori political economy of education dari Carnoy (2019) yang menyatakan bahwa struktur politik menentukan karakter pendidikan. Namun variasi partisipasi di daerah menunjukkan perlunya memperluas teori agar dapat menjelaskan perbedaan antar wilayah. Data empiris memberi dasar untuk menyusun model konseptual baru mengenai hubungan antara reformasi politik dan kebijakan pendidikan. Model ini menempatkan kapasitas daerah, partisipasi publik, dan stabilitas regulasi sebagai tiga faktor moderasi yang menentukan besar kecilnya pengaruh reformasi terhadap kebijakan pendidikan. Temuan ini memodifikasi teori sebelumnya yang cenderung melihat hubungan

politik dan kebijakan pendidikan sebagai hubungan langsung tanpa variabel perantara.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi politik setelah 1998 memberi pengaruh nyata terhadap arah kebijakan pendidikan nasional. Perubahan sistem politik membuka ruang partisipasi publik, memperluas kewenangan pemerintah daerah, dan menggeser orientasi kebijakan pendidikan menuju pola yang lebih demokratis. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa reformasi tidak hanya mengubah struktur kebijakan, tetapi juga memengaruhi praktik di sekolah, alokasi penganggaran, dan cara masyarakat memahami fungsi pendidikan. Variasi kapasitas daerah membuktikan bahwa dampak reformasi tidak seragam. Kebijakan pendidikan berjalan lebih efektif pada daerah yang memiliki kemampuan institusional lebih kuat. Temuan ini mendukung hubungan kausal antara reformasi politik dan perubahan arah kebijakan pendidikan sesuai tujuan penelitian.

Saran dari hasil penelitian ini membuka peluang untuk memperdalam analisis tentang kapasitas daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kebijakan pendidikan. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model evaluasi yang mengukur secara jelas hubungan antara partisipasi publik, stabilitas regulasi, dan kinerja kebijakan pendidikan. Pengembangan studi komparatif antar daerah menjadi penting untuk melihat bagaimana variasi kapasitas memengaruhi hasil kebijakan. Kajian yang lebih fokus pada dinamika sekolah swasta dan dampak desentralisasi terhadap kesenjangan layanan pendidikan juga layak dilakukan untuk memperkaya pemahaman mengenai dampak reformasi secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, R. (2024). *Politik pendidikan di era reformasi: Antara demokratisasi dan komersialisasi pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Batubara, R., & Aman, A. (2024). *Transformasi kebijakan pendidikan Indonesia pasca reformasi politik 1998*. Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Humaniora, 5(1), 22–35.
- Carnoy, M. (2019). *The political economy of education: Implications for growth and equity*. Stanford University Press.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy* (14th ed.). Pearson Education.
- Hafidati, R. (2021). *Analisis kebijakan publik bidang pendidikan pada masa reformasi di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Ilmu Humaniora, 3(2), 45–58.
<https://journal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/770>

- Hafidati, R. (2021). Reformasi kebijakan pendidikan di Indonesia: Antara idealisme demokrasi dan realitas birokrasi. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 10(2), 145–159.
- Haryanto, S. (2020). *Reformasi Politik dan Dampaknya terhadap Pendidikan Nasional*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 9(2), 101-115.
- Irawan. (2019). *Filsafat Manajemen Pendidikan Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. (Cetakan pertama).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Rondinelli, D. A. (1981). Government decentralization in comparative perspective: Theory and practice in developing countries. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133–145.
- Samsuri. (2011). *Pendidikan kewarganegaraan: Paradigma baru dalam pembentukan warga negara demokratis*. UNY Press.
- Samsuri. (2011). *Politik pendidikan kewarganegaraan di era reformasi*. Civics Education Journal, 8(1), 14–29. <https://jurnal.uny.ac.id/index.php/cp/article/view/4233>
- Sari, F., & Sirozi, M. (2023). Reformasi pendidikan Islam di Indonesia: Arah kebijakan dan tantangan implementasi. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 8(1), 57–72.
- Sidauruk, R., Lestari, E., & Hanafiah, H. (2022). Evaluasi kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia: Antara otonomi dan ketimpangan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 9(3), 201–219.
- Sumintono, B. (2024). Manajemen berbasis sekolah dalam konteks desentralisasi pendidikan Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 19(1), 12–25.
- Supriyadi, D., & Lestari, A. (2021). *Perubahan Kurikulum di Indonesia: Antara Konsistensi dan Inovasi*. Jurnal Pendidikan Indonesia, 10(1), 45-60.
- Supriyadi, E., & Lestari, T. (2021). *Dinamika Perubahan Kurikulum di Indonesia: Respons terhadap Tuntutan Global dan Nasional*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 6(1), 45-60.
- Suryadi, B. (2018). *Desentralisasi Pendidikan dan Tantangannya di Indonesia*. Jurnal Manajemen Pendidikan, 5(2), 133-148.
- Susanti, R. (2019). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Pendidikan Pasca Reformasi*. Jurnal Pendidikan dan Pembangunan, 27(2), 89-104.
- Syafruddin, A. (2020). *Politisasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah*. Jurnal Demokrasi, 12(1), 56-70.

Copyright for this article is retained by the author(s)

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

